

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBSI UNSRAT)

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PASCA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF EKOLOGI
MANAJEMEN DI KABUPATEN NIAS**

Fetriaman Telaumbanua, Ayler Beniah Ndraha

Universitas Nias

ARTICLE INFO

Keywords:

Strategy, Local Government, Poverty Alleviation, Management Ecology.

Kata Kunci:

Strategi, Pemerintah Daerah, Penanggulangan, Kemiskinan, Ekologi Manajemen.

Corresponding author:

Fetriaman Telaumbanua
fetriamantel@gmail.com_

Abstract. *The Covid-19 pandemic has had a serious impact on poverty in Nias District. This research explores the strategies adopted by the Nias Regency Government in overcoming post-pandemic poverty, taking into account the management ecological perspective. The choice of this topic is based on the urgency of tackling poverty as a socio-economic impact of the Covid-19 pandemic. This research method uses a qualitative approach, including in-depth interviews with stakeholders and the public as well as direct observation. The results of the study revealed that the local government of Nias Regency has implemented various strategies, such as strengthening the local economy, providing social assistance to the community. Management ecology is integrated into the strategy, with a focus on sustainable natural resource management and active community participation. The results of this study underscore the importance of a poverty alleviation strategy by the Nias district government. Implementation of an ecology-based strategy can increase community resilience to the poverty crisis due to the Covid-19 pandemic, as well as create jobs and community economic recovery. This conclusion emphasizes the need for a holistic approach in post-pandemic policies to ensure economic, social and environmental sustainability in Nias District.*

Abstrak. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap kemiskinan di Kabupaten Nias. Penelitian ini mengeksplorasi strategi yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam mengatasi kemiskinan pasca pandemi, dengan mempertimbangkan perspektif ekologi manajemen. Pemilihan topik ini didasarkan pada urgensi penanganan kemiskinan sebagai dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, dan masyarakat serta observasi langsung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nias telah mengimplementasikan berbagai strategi, seperti penguatan ekonomi lokal, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Ekologi manajemen diintegrasikan dalam strategi tersebut, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Implementasi strategi berbasis ekologi dapat meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap krisis kemiskinan akibat pandemi Covid-19, serta menciptakan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi masyarakat. Kesimpulan ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam kebijakan pasca pandemi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Nias.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak (Abidin et al., 2013). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan lainnya.

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus. Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kemiskinan (Wibisono et al., 2022). Pandemi Covid-19 yang meletus di seluruh dunia telah memberikan dampak serius pada berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian dan tingkat kemiskinan di banyak wilayah. Pandemi Covid-19 telah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan angka kemiskinan akibat berbagai faktor ekonomi yang dipicu oleh pandemi ini (Pratama & Chandra, 2022).

Pertama-tama, pandemi telah mengganggu sektor ekonomi secara luas. *Lockdown* dan pembatasan mobilitas yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus telah menyebabkan banyak usaha kecil dan menengah terpaksa tutup atau beroperasi dalam skala terbatas. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja massal dan penurunan pendapatan bagi pekerja yang terdampak, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kemiskinan. Banyak pekerja sektor informal juga merasakan dampak serius, karena mereka kehilangan mata pencaharian tanpa jaminan sosial yang memadai (Diba & Harahap, 2020).

Kedua, sektor pariwisata, perhotelan, dan hiburan adalah contoh nyata bagaimana pandemi ini telah berdampak negatif terhadap perekonomian. Banyak destinasi wisata mengalami penurunan drastis dalam jumlah pengunjung, menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi ribuan pekerja di sektor ini. Selain itu, sektor pendidikan juga terdampak, dengan penutupan sekolah yang mengakibatkan ketidaksetaraan akses pendidikan dan potensi dampak jangka panjang terhadap generasi muda (Ramadhani, 2023).

Ketiga, dampak psikologis pandemi juga berkontribusi terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Ketidakpastian akan masa depan, isolasi sosial, dan kekhawatiran akan kesehatan telah menyebabkan peningkatan masalah kesejahteraan mental. Kondisi ini bisa memengaruhi produktivitas, kualitas hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Kabupaten Nias merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan termasuk daerah 2T (Daerah Tertinggal, dan Terluar). Daerah 2T merupakan wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional tidak luput dari konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran virus ini. Pandemi ini telah menunjukkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada daerah ini, memperburuk masalah kemiskinan yang telah ada sebelumnya (Tanjung & V, 2023). Tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Nias telah menjadi perhatian serius pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai salah satu daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kabupaten Nias memiliki dinamika ekonomi yang unik. Namun, dampak pandemi ini telah membawa pergeseran drastis dalam struktur ekonomi lokal.

Sejak munculnya pandemi, Kabupaten Nias mengalami perubahan dramatis dalam aktivitas ekonomi dan gaya hidup masyarakat (Andjar Prasetyo, 2021). Sektor pariwisata, yang sebelumnya

menjadi salah satu penyumbang pendapatan utama daerah ini, mengalami kemerosotan yang signifikan. Langkah-langkah pembatasan dan penutupan objek wisata, penerbangan, serta kegiatan ekonomi publik telah menghantam sektor ini secara serius. Hal ini berdampak pada penurunan tajam jumlah pengunjung dan pendapatan yang dihasilkan, menyebabkan berbagai pelaku usaha di sektor pariwisata menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kelangsungan bisnis mereka.

Di sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung perekonomian di daerah ini, pandemi juga menghadirkan tantangan besar. Pembatasan pergerakan dan hambatan dalam rantai pasokan pertanian telah mengganggu seluruh proses produksi, distribusi, dan penjualan hasil panen. Petani di Kabupaten Nias mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan mendapatkan pendapatan yang layak. Keterbatasan akses ke pasaran dan ketersediaan bahan pertanian seperti pupuk dan benih telah menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Dengan demikian, kemampuan petani untuk mengangkat diri dari garis kemiskinan semakin terbatas.

Selain itu, dampak pandemi ini juga merembes ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nias. Banyak UMKM terpaksa mengurangi skala operasional atau bahkan berhenti beroperasi sama sekali akibat penurunan permintaan. Penurunan aktivitas ekonomi ini berdampak langsung pada pendapatan dan mata pencaharian masyarakat, terutama bagi pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian. Tingkat pengangguran yang meningkat dan daya beli masyarakat yang semakin tergerus semakin memperburuk masalah kemiskinan yang telah ada. Perlu diakui bahwa respons terhadap pandemi ini adalah tindakan yang mendesak dan penting untuk melindungi masyarakat dan memitigasi dampak ekonomi yang merugikan. Namun, tantangan besar dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Nias dalam menghadapi situasi ini. Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal fasilitas kesehatan dan tenaga medis, telah membatasi kemampuan pemerintah untuk merespons secara efektif dan untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Di bawah ini dapat terlihat jumlah dan tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias:

Tabel 1.
Persentase Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Nias (2019-2022)

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2019	361, 698	22, 10	15, 95
2	2020	405, 355	23, 12	16, 06
3	2021	428, 739	24, 33	16, 82
4	2022	454, 570	23, 23	16, 00

Dalam kondisi seperti ini, penting untuk mengambil langkah-langkah yang strategis dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang semakin memburuk di Kabupaten Nias. Perlu adanya pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Selain itu, perlu juga adanya pemikiran inovatif dalam merumuskan solusi jangka panjang yang dapat membantu Kabupaten Nias pulih dari dampak pandemi ini dan mencapai tingkat keberlanjutan ekonomi yang lebih baik.

Dalam konteks ini, penelitian tentang strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan

kemiskinan pasca pandemi Covid-19 dengan perspektif ekologi manajemen di Kabupaten Nias menjadi sangat relevan. Upaya pemerintah untuk merespons dampak pandemi pada tingkat kemiskinan haruslah terinformasi dengan baik dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perencanaan dan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Nias.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana pemerintah daerah menangani kemiskinan setelah pandemi Covid-19. Penelitian ini juga memberikan gambaran informasi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dan juga rekomendasi untuk kolaborasi dengan seluruh masyarakat dalam upaya mengendalikan tingkat kemiskinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran dan kondisi kemiskinan terkini di Kabupaten Nias?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan pasca pandemi Covid-19 perspektif ekologi manajemen di Kabupaten Nias?
3. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan pasca pandemi Covid-19 perspektif ekologi manajemen di Kabupaten Nias?

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menguraikan beberapa tujuan pada penelitian ini :

1. Untuk mengetahui gambaran dan kondisi kemiskinan terkini di Kabupaten Nias.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan pasca pandemi Covid-19 perspektif ekologi manajemen di Kabupaten Nias.
3. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan pasca pandemi Covid-19 perspektif ekologi manajemen di Kabupaten Nias.

KAJIAN TEORI

A. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini adalah Manajemen. Menurut (Burhanudin Gesi, 2019) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan menurut (Rizqi, 2022) manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi dasar manajemen menurut Sukarna (2018) dibagi menjadi empat, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi dasar manajemen ini biasanya disingkat POAC.

B. Middle Theory

Middle theory pada penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan. Cabang ilmu ini menganalisis masalah dalam proses pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, hutang luar negeri, dan ketimpangan pendapatan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Tujuannya adalah mengatasi masalah ini agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonomi lebih baik dan cepat.

Proses ini meningkatkan pendapatan per kapita riil dalam jangka panjang atau lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Kajian dalam ekonomi pembangunan dibagi menjadi deskriptif dan analitis. Pertama, memberikan gambaran perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang serta dampaknya terhadap kemungkinan membangun ekonomi kawasan tersebut. Kedua, menawarkan kebijakan pembangunan untuk mempercepat proses ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan demikian, analisis ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu yang menganalisis masalah negara-negara berkembang dan mencari cara mengatasi masalah-masalah tersebut untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

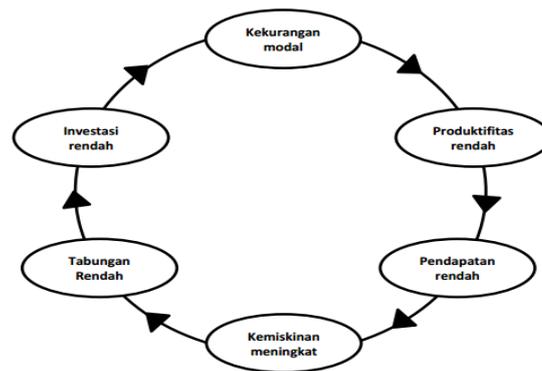
C. Applied Theory

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah, atau singkatnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan (Sarbaini, 2022). Adapun ciri-ciri dari kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, dan pangan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti :
 - a) Kesehatan
 - b) Pendidikan
 - c) Sanitasi
 - d) Air bersih
 - e) Transportasi
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti :
 - a) Anak terlantar
 - b) Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT)
 - c) Janda miskin
 - d) Kelompok marjinal dan terpinggirkan

Gambar 1.
Paradigma Lingkaran Kemiskinan



Sumber : Ragnar Nurkse (1953)

2. Faktor Kemiskinan

Larasati Prayoga et al. (2021) mengemukakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti upah minimum yang tidak mencukupi, standar hidup yang rendah, dan peningkatan pengangguran setiap tahun. Upah minimum dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kemiskinan. Tingkat standar hidup tercermin dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan bakat. Pangiuk (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sosial dan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan. Keterbatasan lapangan kerja menjadi penyebab utama pengangguran dan kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kepadatan penduduk meningkat. Ini membuat Indonesia menjadi negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan penduduk hidup dalam kemiskinan.
- b) Distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketidakmerataan pembangunan nasional tercermin dalam ketidaksetaraan pendapatan di kalangan penduduk.

Nurkse menunjukkan beberapa penyebab kemiskinan:

- a) Ketidaksetaraan dalam pemikiran tentang sumber daya menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata, dengan penduduk miskin memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah.
- b) Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengurangi produktivitas dan upah, karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan.
- c) Lingkaran kemiskinan dimulai dari keterbelakangan, kurangnya modal, dan rendahnya produktivitas, yang akhirnya menghasilkan pendapatan yang rendah.

Dalam keseluruhan, kemiskinan disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan demografis seperti ketidaksetaraan pendapatan, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

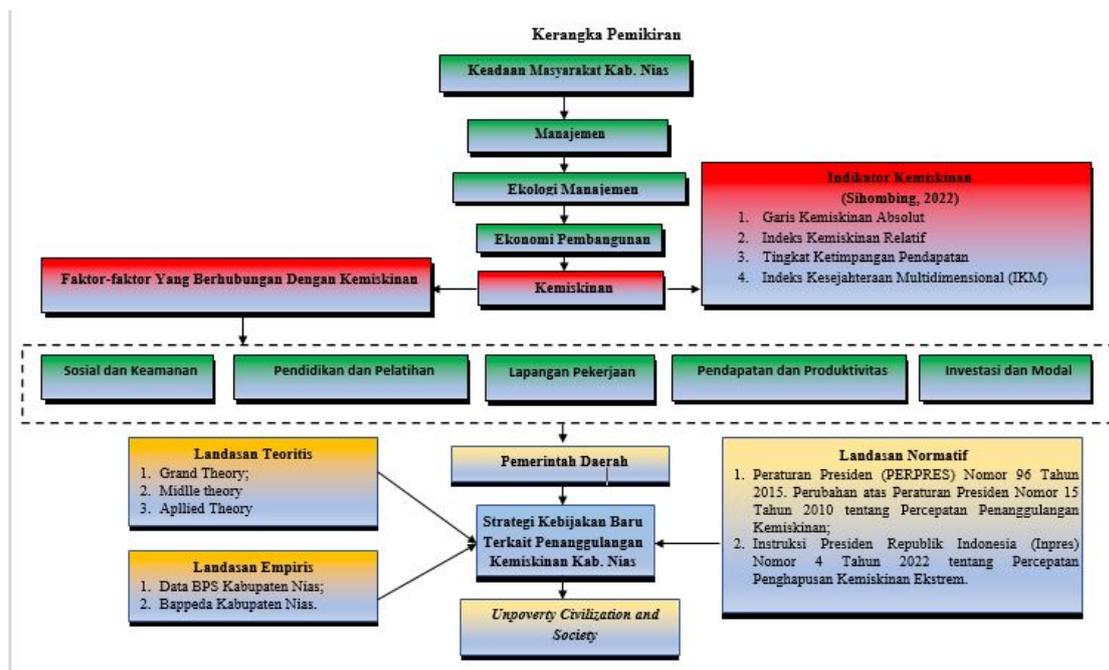
3. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan adalah ukuran dimana seseorang atau masyarakat dinyatakan miskin atau tidak. Salah satu indikator ini dapat diukur dengan penentuan garis kemiskinan, yaitu ukuran yang

menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan bukan makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi (Alfiah et al., 2021). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 4 (empat) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Garis Kemiskinan Absolut
2. Indeks Kemiskinan Relatif
3. Tingkat Ketimpangan Pendapatan
4. Indeks Kesejahteraan Multidimensional (IKM)

Gambar 2
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi penanggulangan kemiskinan pasca pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Fokus penelitian ini berada di Kabupaten Nias, di mana peneliti berusaha untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang langkah-langkah konkret yang diambil dalam mengatasi dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pandemi. Dalam upaya memperoleh pemahaman yang kaya dan komprehensif, teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara digunakan secara kombinitif. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan strategi-strategi tersebut, sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan perspektif dan pemahaman dari berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Nias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen di Kabupaten Nias

Pasca pandemi Covid-19, Kabupaten Nias menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dampak ekonomi dari pandemi telah memberikan pukulan berat terhadap perekonomian lokal, menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan ketidakstabilan dalam penghasilan penduduk. Banyak sektor ekonomi di Kabupaten Nias, seperti pariwisata, pertanian, kehutanan dan perdagangan, terpukul keras akibat dampak Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi. Kemiskinan di Kabupaten Nias semakin diperparah oleh keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan selama pandemi. Pembatasan mobilitas dan penutupan sekolah telah memengaruhi pendidikan anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah, sementara sulitnya akses terhadap layanan kesehatan juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor informal yang menjadi mata pencaharian banyak penduduk juga terdampak, karena pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan untuk menjalankan aktivitas usaha mereka.

Pemerintah Kabupaten Nias berupaya keras untuk mengatasi dampak kemiskinan pasca pandemi ini. Mereka menerapkan berbagai strategi, seperti program bantuan sosial kepada keluarga miskin, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja, serta upaya untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Meskipun tantangan masih besar, langkah-langkah ini mencerminkan tekad untuk membangkitkan perekonomian Kabupaten Nias dan mengurangi tingkat kemiskinan yang terpukul akibat pandemi Covid-19. Keadaan Kabupaten Nias ditinjau dari indikator kemiskinan:

1. Garis Kemiskinan Absolut

Sebelum pandemi, Kabupaten Nias telah menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan. Namun, pandemi Covid-19 semakin memperparah situasi ini. Menurut penentuan garis kemiskinan absolut, banyak keluarga di Kabupaten Nias yang tergolong miskin dan terancam kehilangan akses ke kebutuhan pokok seperti pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

2. Indeks Kemiskinan Relatif

Keadaan Kabupaten Nias dari perspektif indeks kemiskinan relatif mengalami perubahan yang signifikan akibat dampak wabah Covid-19. Sebagai sebuah kabupaten yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi khas, pandemi telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Nias. Indeks kemiskinan relatif mencerminkan perbandingan tingkat kemiskinan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam suatu populasi, dan dalam konteks Kabupaten Nias, perubahan ini dapat dilihat dalam beberapa dimensi yang berbeda.

3. Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Berbagai wilayah di Kabupaten Nias, terlihat adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di antara masyarakat. Di kawasan pedesaan, terutama yang mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, penurunan produksi dan akses pasar yang terbatas telah berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga. Kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah dan pekerjaan informal menjadi lebih rentan menghadapi dampak ekonomi negatif ini. Selain itu, observasi juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan perdagangan, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat Kabupaten Nias, mengalami penurunan signifikan. Banyak usaha mikro dan kecil terpaksa berhenti beroperasi atau mengurangi skala bisnis mereka. Akibatnya, warga yang bergantung pada sektor ini menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan pendapatan mereka, mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan di kalangan mereka.

4. Indeks Kesejahteraan Multidimensional (IKM)

Pasca pandemi Covid-19, gambaran Indeks Kesejahteraan Multidimensional (IKM) di Kabupaten Nias mengalami sejumlah perubahan yang signifikan. Dampak pandemi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan telah mempengaruhi secara mendalam dimensi-dimensi kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, terjadinya penurunan pendapatan, hilangnya pekerjaan, dan gangguan dalam sektor usaha mengakibatkan adanya kenaikan angka kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Di sisi kesehatan, pandemi ini telah menimbulkan tantangan serius dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan risiko kesehatan mental, dan penurunan akses terhadap gizi yang mempengaruhi dimensi kesejahteraan kesehatan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen Di Kabupaten Nias

1. Faktor pendukung dalam upaya mengatasi dampak kemiskinan meliputi beberapa aspek. Pertama, kebijakan Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang ditingkatkan dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, bersama dengan program bantuan sosial seperti BLT, bantuan pangan non-tunai, serta subsidi listrik, berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Kedua, kolaborasi yang terjadi antara berbagai instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Sosial, memiliki peran signifikan dalam menghadapi dampak negatif. Kerjasama yang terkoordinasi ini mampu mengintegrasikan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan dengan upaya perlindungan sosial dan peningkatan infrastruktur. Ketiga, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan dan pemberian akses modal usaha, turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini tidak hanya memajukan individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan IKM dengan memperbaiki kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan kemiskinan meliputi keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan tenaga kerja, yang mempengaruhi pelaksanaan program. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana secara efisien agar program-program ini memberikan dampak yang besar. Selain itu, ketergantungan pada sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM yang terdampak pandemi, dapat mempengaruhi pendapatan dan kemiskinan; oleh karena itu, diversifikasi ekonomi diperlukan. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga dapat memengaruhi indeks kesejahteraan, khususnya di wilayah terpencil, yang membutuhkan perhatian khusus. Selanjutnya, resistensi terhadap perubahan di kalangan masyarakat Nias dapat mempengaruhi penerapan program baru, terutama dalam situasi pembatasan ekonomi; oleh karena itu, edukasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

C. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19 Perspektif Ekologi Manajemen di Kabupaten Nias

Pemerintah Kabupaten Nias berusaha keras untuk mengarahkan penanganan strategis, beberapa hal yang bisa menjadi opsi pintu bantuan bagi warga yang terkena dampak Covid-19. Berikut adalah pintu bantuan tersebut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang data nya sudah tercatat di

pemerintah sebagai penerima bantuan rutin dari pemerintah.

2. Pemberian bantuan ketahanan pangan dengan mengalokasikan anggaran dari Kabupaten Nias sesuai dengan peruntukannya masing-masing desa yang disesuaikan dari APBDes sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pemerintah Desa boleh melakukan realokasi anggaran Dana Desa.
3. Penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang mengalokasikan anggarannya memberikan bantuan per keluarga untuk setiap tiga bulan selama pandemi.
4. Penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Selain daripada hal di atas terdapat modifikasi dari Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan dijabarkan kedalam 4 (empat) pilar langkah kebijakan yang menjadi acuan bagi stakeholders dalam proses penyusunan Poverty Reduction Strategy (PRS) di Kabupaten Nias yakni:

1. Pengembangan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses internet di wilayah yang terdampak kemiskinan. Pengembangan infrastruktur ini akan membuka akses baru bagi peluang ekonomi dan pekerjaan, terutama di pedesaan. Selain itu, pelatihan dan akses terhadap teknologi modern juga perlu ditingkatkan untuk memperluas keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif.

2. Promosi Kewirausahaan, Pariwisata dan Inovasi

Pemerintah Daerah dapat mendorong budaya kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muda. Program pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap modal usaha dapat membantu masyarakat untuk memulai usaha mereka sendiri dan menciptakan peluang baru. Selain itu, inovasi dalam produk dan layanan lokal juga dapat menjadi daya tarik yang kuat, membuka peluang baru dalam meningkatkan pendapatan dan mendukung pemulihan ekonomi.

3. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pelatihan Keterampilan

Pemerintah Kabupaten Nias dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk merancang program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan nasional. Program ini dapat mencakup berbagai bidang seperti pertanian modern, pengolahan makanan, kerajinan, dan teknologi informasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, akan tercipta peluang kerja baru dan pendapatan yang lebih tinggi di Kabupaten Nias.

4. Program Pemberdayaan Wanita dan Pemuda

Melalui kolaborasi dengan masyarakat dan dukungan riset dari BRIN, Pemerintah Kabupaten Nias dapat mengembangkan program pemberdayaan khusus untuk wanita dan pemuda. Ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, akses ke kredit mikro, dan pendampingan dalam mengembangkan usaha kecil. Pemberdayaan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga kontribusi ekonomi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias pasca pandemi Covid-19 dari perspektif ekologi manajemen, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Nias berupaya sungguh-sungguh dalam mengarahkan upaya penanganan strategis untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Beberapa pintu bantuan telah diidentifikasi sebagai opsi yang signifikan dalam upaya mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini diantaranya

1) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 2) Bantuan Ketahanan Pangan dari Dana Desa, 3) Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, 4) Bantuan dari Pemerintah Provinsi. Selain dari pintu-pintu bantuan di atas, penelitian ini juga mengidentifikasi modifikasi dari Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Nias. Modifikasi ini diuraikan dalam empat pilar langkah kebijakan, yang menjadi panduan bagi *stakeholder* dalam menyusun *Poverty Reduction Strategy* (PRS) di Kabupaten Nias yakni 1) Pengembangan Infrastruktur dan Akses Teknologi, 2) Promosi Kewirausahaan, Pariwisata, dan Inovasi, 3) Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pelatihan Keterampilan, 4) Program Pemberdayaan Wanita dan Pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., Octaviani, R., Fredian Tonny Nasdian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian di Kabupaten Bogor, dan, Kasus di Kecamatan Pemijahan dan Leuwiliang, S., Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Kabupaten Bogor, S. DI, Kasus Kecamatan Pemijahan Dan Leuwiliang, S. DI, & Fredian Tonny Nasdian, dan. (2013). Strategies in Alleviating Poverty through Agricultural Development in Bogor Regency (Case Study in Pamijahan and Leuwiliang Subdistrict). In *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* (Vol. 5, Issue 2).
- Alfiah, F., Almadayani, A., Al Farizi, D., & Widodo, E. (2021). Analisis Clustering K-Medoids Berdasarkan Indikator Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2020. *JURNAL ILMIAH SAINS*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.35799/jis.v22i1.35911>
- Andjar Prasetyo. (2021). Pemulihan Lanskap Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 267–282. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.71>
- Burhanudin Gesi, R. L. F. L. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen*, 3(No 2).
- Buulolo, et al. (2022). Analisis Implementasi SISKUDES di Desa Sinar Baho Kecamatan Lahusa. *Jurnal Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43993>
- Caniago, A. P. et al. (2022). "Peran Kecamatan dalam Evaluasi Dana Desa Ladara di Kecamatan Tuheumberua, Kabupaten Nias Utara (Studi Kasus Desa Ladara)." *Jurnal Ilmiah Simantek*, vol. 6, no. 4, November 2022, ISSN 2550-0414.
- Diba, F., & Harahap, S. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Khususnya Dunia Ketenagakerjaan*.
- Fandi Zulfian Zebuai et al. (2022). "Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Orahili Tumori." *Jurnal Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, vol. 10, no. 4, 2022. DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43989>.
- Fatihah, D. C., & Saidah, I. S. (2021). Model Promosi Marketplace Berbasis Artificial Inteligence (AI) di Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35908>
- Gea et al. (2022). "Evaluasi Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara Tahun 2021." *Jurnal Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43994>.
- Halawa, S. J. et al. (2022). Dinamika Perubahan Profesionalisme Pegawai sebagai Bentuk Adaptasi Sistem Kerja Baru di Tempat Usaha di Kota Gunungsitoli. *Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, 10(4), <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43997>.
- Hasan Toyib et al. "Kolaborasi Sumber Daya Manusia dalam Pencapaian Target dan Sasaran Kinerja LKPI pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias." *Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, vol. 10, no. 4, 2022, <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43995>.
- Kasih, M. I. et al. (2022). "Penguatan Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa yang Berkualitas di Desa Lolozasai Kecamatan Gido." *Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, vol. 10, no.

- 4, 2022, <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43992>.
- Kansil, D. F., Tulung, J. E., & Pandowo, M. H. C. (2022). Antecedent Peer-To-Peer Lending Investment Intention In Manado. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i2.42345>
- Mendrofa, V. M. et al. (2022). "Peran Kepemimpinan Transformasional di PT. Cabang Bank Sumut Gunungsitoli dalam Menjaring Kerjasama dengan Stakeholder sebagai Mitra Kerja Pemerintah di Kota Gunungsitoli." *Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43996>
- Maichel Wutoy., et al. "Application of the Presidential Threshold Concept in the Presidential and Vice-Presidential Election System and its Impact on the Indonesian Constitutional System." *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, vol. 2022, no. 7, 2022, pp.
- Minta Indah Laoli et al. (2022). "Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus BPKPD sebagai Leading Sektor Penganggaran)." *Journal of Empowering Management for Business and Administration (EMBA)*, 10(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43987>
- Ndraha, A. B. (2023). Optimizing Public Services: Reconstructing the Discordant Relationship between Local Leaders to Foster Harmony (A Case Study of Indonesia). *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 2(07), 18–34. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i07.143>
- Ndraha, A. B. ., & Uang, D. P. . (2022). Camat's Leadership in Increasing Community Participation in Development in the Era of Disruption and Social Society 5.0 (Case Study Districts at Nias Regency). *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 1(01), 55–66. <https://doi.org/10.56982/journalo.v1i01.23>
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara [Empowerment Strategies for Village Communities through Local Economic Development in West Halmahera Regency, North Maluku Province]. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(2), 137–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/j-3p.v3i2.867>
- Ndraha, A. B. et al. "Delegation Policy Implementation Model of Regent's Authority to District Head (Camat) on Local Autonomy in Nias Regency, North Sumatera Province." *Journal of Public Administration and Governance*, vol. 9, no. 3, 2019, ISSN 2161-7104.
- Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak Strategis Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan pada Masa Pandemi COVID-19 melalui Program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 63–76. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41238>
- Pratiwi & Ndraha, A. B. (2018). Strategi Pengendalian Banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal MSDM*, 5(2), 141-156.
- Ramadhani, Y. C. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 200–212. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.4395>
- Rizqi, R. M. (2022). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Manajemen Pengetahuan. In *Journal Manajemen dan Bisnis* (Vol. 5, Issue 1). <https://jurnal.uts.ac.id>
- Sarbaini, Z. & N. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terpadu (JTMI)*, 1, 131–136.
- Tanjung, E. P., & V, Y. L. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Provinsi Bengkulu : Studi

Komparatif Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ecogen*, 6(2), 298.
<https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i2.14712>

Waruwu, E. et al. (2022). "Peluang dan Tantangan G20 dalam Transformasi Manajemen Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 dan Civil Society 5.0 Pasca Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmiah Maksitek*, vol. 7, no. 3, 26-32. Retrieved from <https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/345>

Wibisono, R., Salma¹, N. Q., Hasanah², N., & Mutiah³, P. (2022). *Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Resiko Peningkatan Kemiskinan Di Indonesia*. 3(I).